

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN BEKASI

Rizka Bunga Mustika¹⁾, Adam Zakaria²⁾, Petrolis Nusa Perdana³⁾

Program Studi S.Tr. Akuntansi Sektor Publik

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted: 30 Juli 2024	Accepted: 5 Agustus 2024	Published: 6 Agustus 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi dan mengetahui strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SAMSAT Kabupaten Bekasi. Desain penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak yaitu ekonomi, kurangnya kesadaran, kesulitan pengaturan waktu, pemindahtanganan kendaraan dan kurangnya pengetahuan wajib pajak. Strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT yaitu melakukan koordinasi dengan perusahaan, membuat program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan, melakukan *door to door* ke alamat penunggak, memberikan layanan pembayaran pajak melalui *online*, memberikan layanan samsat keliling, dan SMS Blast atau WhatsApp Blast.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor

Pendahuluan

Pembangunan suatu negara harus terjadi secara merata di seluruh negeri dan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat guna memperbaiki hidup. Setiap daerah sudah diberi wewenang untuk mengatur ekonominya sendiri, dan untuk mencapai pembangunan nasional diperlukan kesiapan dana yang besar (Kurniawan & Azmi, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang menunjang keuangan daerah dan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah, penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia dan diharapkan dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pajak dapat memberikan yang optimal terhadap pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia (Sadewa, 2022).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah yang berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran dan kepatuhan sekelompok orang untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini merupakan data mengenai wajib pajak yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi:

Tabel 1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang Tidak Melakukan Pembayaran PKB	%
2021	1.494.314	469.983	31,56
2022	1.513.555	453.455	30,35
2023	1.556.294	465.647	30,77

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi belum stabil dikarenakan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena masih ada wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang merupakan kendaraan beredar yang tidak membayar tepat waktu sehingga kendaraan tersebut tidak terdaftar di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan.

Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak yang patuh melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi:

Tabel 2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang Sudah Melakukan BBNKB	%
2021	1.494.314	131,536	9
2022	1.513.555	136,177	9
2023	1.556.294	150.571	10

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 2 diatas, wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melakukan proses balik nama masih rendah. Hal ini disebabkan bahwa masih banyak wajib pajak yang merasa jika biaya balik nama mahal dan prosedurnya terlalu rumit.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus untuk mendalami suatu analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman, dengan reduksi data, tampilan data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi.

Hasil

1. Faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berikut faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor:

- a. Ekonomi. Faktor ekonomi memiliki peran sangat signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Kondisi ekonomi yang baik dan pendapatan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mudah.

- b. Kurangnya Kesadaran. Masih adanya wajib pajak yang tidak sengaja melewati tanggal waktu pembayaran karena kesibukkan sehari-hari atau kurangnya pengingat untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak lupa membayar pajak, dapat mengakibatkan pembayaran denda karena telat membayar pajak.
 - c. Kesulitan Pengaturan Waktu. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak sering mengalami kesulitan mengatur waktu karena kesibukan bekerja, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Walaupun pembayaran juga dapat dilakukan secara *online*, wajib pajak harus tetap ke SAMSAT untuk mencetak E-SKKP.
 - d. Pemindahtanganan Kendaraan. Proses alih kepemilikan kendaraan seringkali menyebabkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pembayaran pajak. Masih ada pemilik kendaraan baru yang belum melakukan balik nama kendaraan, sehingga status pembayaran pajak menjadi tidak jelas.
 - e. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak. Kurangnya kepatuhan mengenai prosedur pembayaran ataupun balik nama, tenggat waktu, serta konsekuensi yang didapat ketika terlambat melakukan pembayaran dapat menyebabkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Berdasarkan temuan dari wawancara yang telah dilakukan dan pengamatan secara langsung, penulis dapat mengidentifikasi beberapa strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti:
- a. Melakukan Koordinasi dengan Perusahaan. SAMSAT bekerjasama dengan perusahaan untuk memeriksa kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak.
 - b. Membuat Program Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan, dengan menawarkan pembebasan biaya balik nama kendaraan dan potongan harga untuk pembayaran pajak kendaraan dapat mengurangi beban finansial yang dirasakan wajib pajak.
 - c. Melakukan *Door to Door* ke alamat penunggak. Petugas SAMSAT secara langsung melakukan pemeriksaan ke alamat wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan mendiskusikan mengenai kendala atau yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
 - d. Memberikan Layanan Pembayaran Melalui *Online*, dengan adanya pembayaran online, wajib pajak dapat lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
 - e. Memberikan Layanan Samsat Keliling. Layanan ini, dapat menguntungkan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak tidak perlu melakukan perjalanan jauh datang ke SAMSAT, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan.
 - f. *SMS Blast* atau *WhatsApp Blast*, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang mudah diakses oleh wajib pajak dapat mengingatkan tenggat waktu pembayaran pajak dan informasi penting lainnya. Peringatan ini membantu wajib pajak untuk mencegah wajib pajak lupa atau terlambat membayar kewajiban pajaknya.

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi, terdapat usulan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti. 1) Melakukan Kerjasama Dengan Kelurahan. 2)

Melakukan Rekrutmen dan Pelatihan Sumber Daya Manusia. 3) Melakukan Sosialisasi ke Desa. 4) Pengiriman Dokumen Menggunakan Jasa Kurir.

Kesimpulan

Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi, yaitu ekonomi, kurangnya kesadaran, kesulitan pengaturan waktu, pemindahtanganan kendaraan, kurangnya pengetahuan wajib pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut menjadikan SAMSAT Kabupaten Bekasi memiliki strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu, melakukan koordinasi dengan perusahaan, membuat program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan, melakukan *door to door* ke alamat penunggak, memberikan layanan pembayaran pajak melalui *online*, memberikan layanan *samsat keliling* dan *SMS Blast* atau *WhatsApp Blast*.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alam, S. (2022). Analisis Faktor yang Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Praya. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 572-581.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 86-101.
- BPKAD Kabupaten Kuningan. (2023, Februari 23). *Mengenal APBD Lebih Dekat : Pendapatan Daerah*. Retrieved from [bpkad.kuningankab: https://bpkad.kuningankab.go.id/web_lama/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah](https://bpkad.kuningankab.go.id/web_lama/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah)
- Fernando, Y., Herdi, H., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 353-366.
- Galla, S. R., & Asmapane, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur. *FORUM EKONOMI : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 388-395.
- Grediani, E., Khasanah, E. N., & Indrayanto, L. (2022). Peran Penerimaan PKB dan BBNKB Pada Efektivitas Kinerja SAMSAT Induk Bantul. *Jurnal RisetTerapan Akuntansi*, 289-296.
- Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 14-24.
- Mailindra, W. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi Periode 2006-2021. *Al Fiddoh*, 89-95.
- Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara . *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 98-106.
- May, S., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* , 837-844.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2019. Nomor 9 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Presiden. 2015. Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Purba, M. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Batam. *PROSIDING Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)*, 294-305.
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Depok: RAS (Raih Asa Sukses).
- Ramadhan, M., Urip, T. P., & Purwadi, M. A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1-10.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Samsat Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 56-69.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, S., Ningrum, S., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Selama Pandemi COVID-19. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 197-206.
- Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *Jurnal Universitas Pandanaran*, 1-16.
- Zuriah, R., & Lubis, P. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara. *Jurnal SOSEK (Sosial dan Ekonomi)*, 121-127.